Pertanyaan Sederhana: "Jangan Lupakan Sejarah" Versus "Jangan Lupakan Pelajaran dari Peristiwa Sejarah yang Telah Terjadi"

Miss-Konsepsi dalam Keumuman Bahasa, dan Tradisi Faham yang Tidak Pernah Terserap

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.
Peneliti Independen
Bandar Lampung, Indonesia

2026

I. Dua Frasa, Dua Objek yang Berbeda

Dalam keumuman bahasa sehari-hari, dua frasa berikut sering dianggap saling menggantikan, seolah-olah sinonim yang bisa dipakai bertukar tanpa kehilangan makna: "jangan lupakan sejarah" dan "jangan lupakan pelajaran dari peristiwa sejarah yang telah terjadi". Namun pertanyaan sederhana yang menjadi pokok tulisan ini justru lahir dari kecurigaan bahwa kedua frasa ini, betapapun mirip kedengarannya, menunjuk pada dua objek tata bahasa yang secara fundamental berbeda — dan kekeliruan menyamakan keduanya bukan perkara remeh, melainkan miss-konsepsi yang berakibat jauh pada bagaimana suatu bangsa memperlakukan masa lalunya.

Pada frasa pertama, objek dari kata kerja "melupakan" adalah *sejarah itu sendiri* — peristiwa, rentetan kejadian, atau bahkan, dalam penggunaan yang lebih longgar, identitas dan label dari peristiwa

tersebut. Sejarah di sini diperlakukan sebagai semacam benda: sesuatu yang utuh, yang bisa "diingat" atau "dilupakan" sebagai satu kesatuan, mirip cara seseorang mengingat atau melupakan sebuah nama, sebuah tanggal, sebuah kejadian yang sudah selesai dan tertutup.

Pada frasa kedua, objek dari kata kerja "melupakan" bukan peristiwanya, melainkan *pelajaran* yang terkandung di dalamnya — pola kausalitas, hikmah, peringatan, atau pengetahuan yang dapat diekstraksi dari peristiwa tersebut untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Sejarah di sini bukan tujuan akhir dari ingatan, melainkan sumber atau bahan baku dari sesuatu yang lebih penting untuk diingat: pelajarannya.

Perbedaan ini tampak kecil dalam tata bahasa, namun konsekuensinya sangat besar dalam logika berpikir. Mengingat *sejarah sebagai peristiwa* tidak secara otomatis menghasilkan pengetahuan apa pun — seseorang bisa hafal tanggal, nama, dan urutan kejadian sebuah peristiwa tanpa pernah memahami mengapa peristiwa itu terjadi, apa yang menyebabkannya, dan apa yang semestinya dihindari atau diperbaiki agar tidak terulang. Sebaliknya, mengingat *pelajaran dari sejarah* menuntut proses kognitif yang jauh lebih aktif: analisis kausalitas, refleksi kritis, dan transfer pengetahuan dari konteks lampau ke konteks kini. Frasa pertama bisa terpenuhi hanya dengan menghafal; frasa kedua hanya terpenuhi dengan memahami.

II. Ketika Kata Menjadi Jimat, Bukan Pelajaran

Kekeliruan menyamakan dua frasa ini bukan sekadar persoalan akademik tata bahasa. Ia memiliki konsekuensi nyata yang paling jelas tampak dalam bagaimana kata "komunisme" diperlakukan dalam wacana publik Indonesia pasca-1965. Slogan "jangan lupakan sejarah", yang berulang kali diserukan dalam konteks ini, pada praktiknya jauh lebih sering berfungsi sebagai perintah untuk mengingat-dan-menakuti *kata* dan *label* — komunisme sebagai sebuah nama yang harus diwaspadai, dicurigai, dan dijauhi — ketimbang sebagai perintah untuk memahami *pelajaran* substantif dari rangkaian peristiwa traumatik yang sesungguhnya terjadi: bagaimana konflik ideologis bereskalasi menjadi kekerasan massal, bagaimana institusi negara dan masyarakat sipil bisa runtuh ke dalam pembunuhan kolektif, bagaimana propaganda dan ketakutan dimanipulasi oleh kekuasaan, dan bagaimana mekanisme-mekanisme ini bisa dicegah agar tidak terulang dalam bentuk apa pun di masa depan — terlepas dari ideologi apa yang kelak menjadi pemicunya.

Ketika "jangan lupakan sejarah" dipahami secara keliru sebagai "jangan lupakan untuk takut pada kata ini", kata tersebut berhenti berfungsi sebagai konsep yang dipahami dan berubah menjadi semacam jimat — sesuatu yang kekuatannya justru terletak pada ketidakpahaman, pada aura menakutkan yang tidak butuh penjelasan lebih jauh untuk bekerja. Jimat tidak perlu dipahami untuk ditakuti; ia hanya perlu diucapkan atau ditunjukkan untuk memicu reaksi otomatis. Inilah yang terjadi ketika kata "komunisme" disebut di ruang publik Indonesia: ia sering memicu reaksi penolakan refleks, bukan proses berpikir tentang apa sesungguhnya yang dimaksud, mengapa ia pernah berbahaya dalam konteks tertentu, dan apakah kewaspadaan yang sama relevan untuk konteks yang sama sekali berbeda.

III. Etimologi yang Terputus: *Communis* yang Tidak Pernah Diserap

Kegagalan kontekstualisasi ini tampak paling jelas ketika kita menengok etimologi kata itu sendiri. Istilah komunisme berasal dari bahasa Latin *communis*, yang berarti umum, berbagi, atau milik bersama. Akar kata ini, dalam dirinya sendiri, sama sekali tidak memuat konotasi kekerasan, pengkhianatan, atau ateisme yang melekat padanya dalam memori kolektif Indonesia pasca-1965 — ia adalah konsep deskriptif-netral tentang kepemilikan dan kepentingan bersama, sebuah gagasan yang sebenarnya beririsan dengan banyak nilai yang juga dihormati dalam tradisi lain, termasuk gagasan tentang gotong royong atau kepemilikan komunal dalam berbagai budaya Nusantara sendiri.

Yang terjadi dalam sejarah penyerapan bahasa Indonesia adalah keterputusan genealogis: kata "komunisme" diimpor dan dilembagakan dalam kosakata politik Indonesia bukan melalui proses kontekstualisasi lingual yang menjejak balik ke akar etimologisnya, melainkan langsung melompat ke muatan emosional-traumatik yang terbentuk dari peristiwa 1965 dan kebijakan negara pasca-itu. Akibatnya, kata ini hadir dalam bahasa Indonesia tanpa "ekor genealogis" — tanpa jejak yang menyambungkannya kembali ke makna *communis* yang sesungguhnya netral, dan tanpa proses pemahaman bertahap atas mengapa dan bagaimana sebuah gagasan tentang kepemilikan bersama bisa berkembang menjadi gerakan politik tertentu yang kemudian berbenturan secara berdarah dengan kekuatan politik lain di Indonesia.

Inilah yang dimaksud dengan tradisi faham yang tidak terserap sebagai kontekstualisasi lingual: bahasa Indonesia menerima kata "komunisme" sebagai bunyi-yang-menakutkan, bukan sebagai konsep yang genealoginya dipahami secara utuh — dari akar etimologisnya di Eropa, melalui perkembangan teorinya sebagai gagasan filosofis-ekonomi, hingga penerapan dan distorsinya dalam

konteks politik tertentu, termasuk di Indonesia. Tanpa proses penyerapan yang utuh ini, relevansi yang tersisa hanyalah relevansi parsial: orang tahu untuk takut pada kata itu, namun tidak tahu — dan sering tidak tertarik untuk tahu — pada keseluruhan konteks yang membuat ketakutan itu pernah relevan.

IV. Relevansi Parsial: Yang Hilang Ketika Pelajaran Tidak Diambil

Relevansi parsial inilah konsekuensi paling nyata dari kekeliruan linguistik yang dibahas di Bagian I. Ketika "jangan lupakan sejarah" dipahami sebagai perintah mengingat peristiwa-sebagai-objek (dan, secara reduktif, mengingat kata-yang-menakutkan), bukan pelajaran-sebagai-objek, maka yang diwariskan kepada generasi berikutnya bukanlah pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencegah pengulangan kekerasan dalam bentuk apa pun, melainkan semata sentimen — rasa takut, rasa curiga, atau rasa benci yang diwariskan tanpa pemahaman kausal di baliknya.

Pendidikan formal di Indonesia, dalam banyak kesaksian dan kritik yang telah lama disuarakan, cenderung mengajarkan versi peristiwa 1965 yang menekankan siapa-musuh dan siapa-kawan, bukan menelusuri secara jujur dan kritis bagaimana dan mengapa kekerasan massal bisa terjadi, bagaimana institusi bisa gagal melindungi warganya, dan apa yang sebenarnya bisa dipelajari untuk mencegah tragedi serupa — terlepas dari ideologi mana pun yang kelak menjadi pemicunya di masa depan. Inilah yang dimaksud dengan mengajarkan "takut", bukan mengajarkan "paham": ketakutan bisa diwariskan secara instan melalui label dan slogan, sementara pemahaman menuntut proses pendidikan yang jujur, terbuka, dan bersedia menghadapi kompleksitas serta ambiguitas moral dari peristiwa traumatik itu sendiri.

Relevansi yang sesungguhnya dari peristiwa 1965 — pelajaran tentang bagaimana polarisasi ideologis ekstrem, kegagalan negara melindungi warganya, dan manipulasi ketakutan kolektif oleh kekuasaan dapat berujung pada kekerasan massal — adalah pelajaran yang relevan secara universal, tidak terbatas pada komunisme sebagai ideologi spesifik. Pelajaran yang sama relevan untuk mewaspadai bentuk-bentuk polarisasi ideologis lain, dari ekstremisme apa pun warnanya, di masa kini maupun masa depan. Namun karena yang diwariskan hanyalah ketakutan pada satu kata dan satu label, relevansi universal ini tereduksi menjadi relevansi parsial: kewaspadaan yang sempit pada satu nama, bukan kewaspadaan yang luas pada satu mekanisme yang bisa berulang dalam wajah apa pun.

V. Penutup

Pertanyaan sederhana yang menjadi judul tulisan ini, pada akhirnya, menemukan jawabannya dalam pembedaan yang sejak awal disodorkan: kita tidak diminta — dan tidak semestinya diminta — untuk mengingat sejarah sebagai benda mati yang utuh dan tertutup, lengkap dengan label-label yang menyertainya sebagai jimat ketakutan. Kita diminta untuk mengingat pelajarannya: pola kausalitas, mekanisme kegagalan, dan hikmah yang dapat dipetik untuk mencegah pengulangan kekerasan kolektif dalam bentuk apa pun, oleh ideologi apa pun, di masa kini maupun masa depan.

Selama miss-konsepsi dalam keumuman bahasa ini tidak dibongkar — selama "jangan lupakan sejarah" terus dipahami secara dangkal sebagai "jangan lupakan untuk takut pada sebuah kata" — maka kata "komunisme" akan terus berfungsi sebagai jimat linguistik yang kekuatannya justru bersumber dari ketidakpahaman, bukan sebagai konsep yang genealoginya — dari *communis* yang netral, hingga distorsi sejarahnya yang traumatik — benar-benar dipahami secara utuh dan kontekstual. Dan selama itu pula, pelajaran yang sesungguhnya relevan dari peristiwa 1965 akan terus tereduksi menjadi relevansi parsial: kita akan terus mewarisi ketakutan, tanpa pernah benar-benar mewarisi pemahaman.

Wallahu a'lam bishawab.

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P. (Awe)
Bandar Lampung, 2026